



**PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH, SWASTA, EKSPOR, DAN
IMPOR TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

**MUHAMMAD BAGUS PRASETYO
NIM 130810101219**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH, SWASTA, EKSPOR, DAN
IMPOR TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

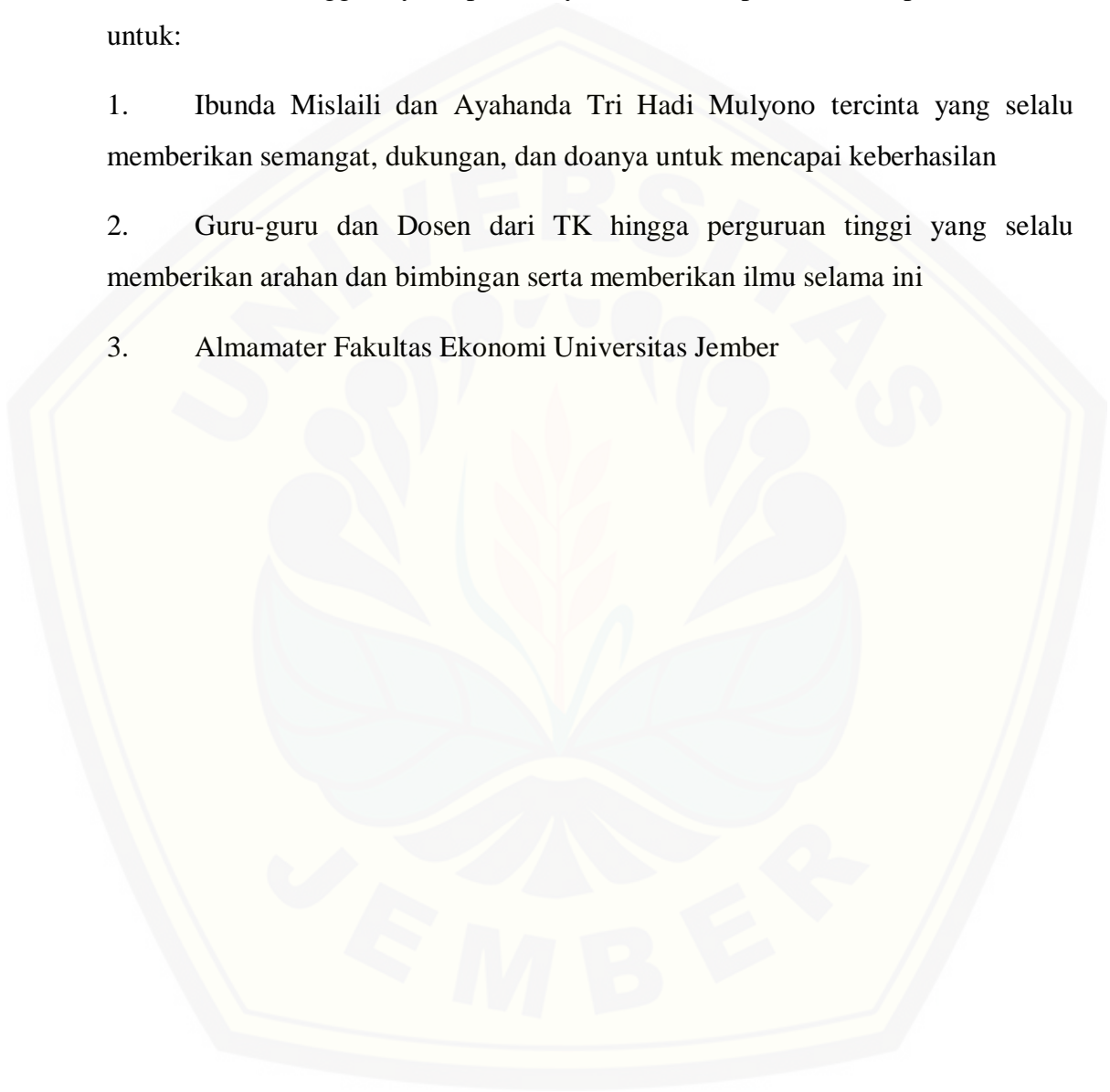
**MUHAMMAD BAGUS PRASETYO
NIM 130810101219**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur dan kerendahan hati yang tiada batas kepada Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan dipersembahkan untuk:

1. Ibunda Mislaili dan Ayahanda Tri Hadi Mulyono tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doanya untuk mencapai keberhasilan
2. Guru-guru dan Dosen dari TK hingga perguruan tinggi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan ilmu selama ini
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember



MOTTO

“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya”

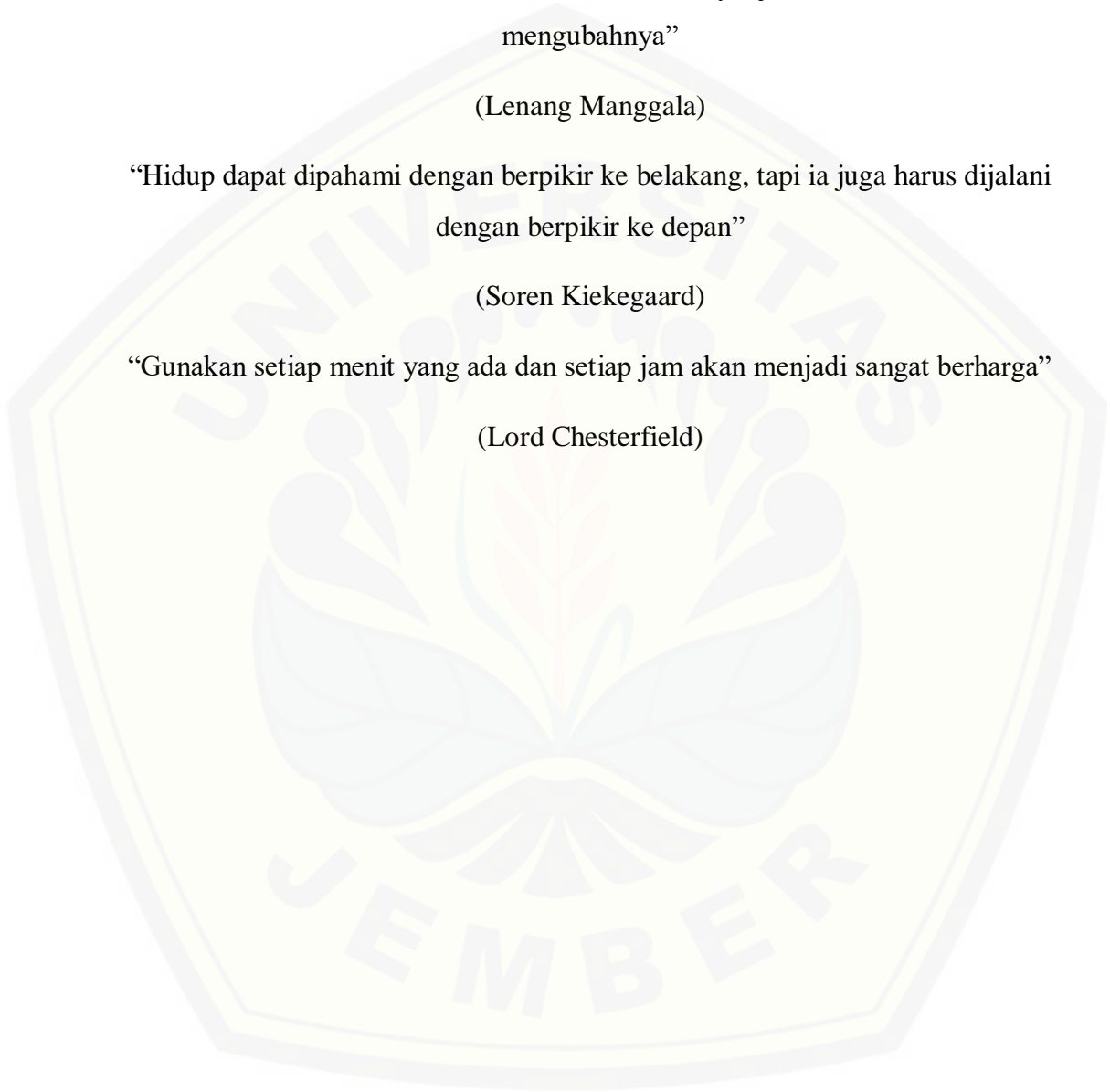
(Lenang Manggala)

“Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang, tapi ia juga harus dijalani dengan berpikir ke depan”

(Soren Kiekegaard)

“Gunakan setiap menit yang ada dan setiap jam akan menjadi sangat berharga”

(Lord Chesterfield)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bagus Prasetyo

Nim : 130810101219

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Pengaruh Investasi Pemerintah, Swasta, Ekspor, dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 November 2020

Yang menyatakan,

Muhammad Bagus Prasetyo

NIM 130810101219

SKRIPSI

**PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH, SWASTA, EKSPOR, DAN
IMPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

Oleh

Muhammad Bagus Prasetyo

NIM 130810101219

Pembimbing

Dosen Pembimbing I :

Dosen Pembimbing II :

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Investasi Pemerintah, Swasta, Ekspor, dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Nama Mahasiswa : Muhammad Bagus Prasetyo

NIM : 130810101219

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 26 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1

Ekonomi Pembangunan

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

**PENGAURH INVESTASI PEMERINTAH, SWASTA, EKSPOR, DAN IMPOR
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Bagus Prasetyo

NIM : 130810101219

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember Fakultas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

*Pengaruh Investasi Pemerintah, Swasta, Ekspor, dan Impor terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*

Muhammad Bagus Prasetyo

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

ABSTRAK

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu komponen dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting bagi kegiatan perekonomian yang baik. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui besarnya nilai PDB di suatu negara. Bila mengalami penambahan pada besar PDB maka dianggap perekonomian mengalami pertumbuhan. Permasalahan yang ada di Indonesia laju pertumbuhannya tidak stabil bisa mengalami pertumbuhan maupun penurunan pada laju pertumbuhannya.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Investasi Pemerintah, Swasta, Ekspor, dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Dengan pengambilan obyek penelitian tahun 2010-2019. Alat analisis yang digunakan adalah metode data panel berupa model fixed effect. Uji Hipotesis menggunakan Uji-F, Uji-t, Koefisien Determinasi dan Uji Asumsi Klasik.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variable Investasi Pemerintah, Swasta, dan Ekspor berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan variable Impor Berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor, dan Impor



The Influence of Public, Private, Export and Import Investment on Economic Growth in Indonesia

Muhammad Bagus Prasetyo

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of
Economics and Business
University of Jember*

ABSTRACT

Economic growth is one component of a country's economic development. Economic growth is an important component for sound economic activity. Where economic growth can be seen through the amount of GDP in a country. If you experience an increase in the amount of GDP, it is considered that the economy is experiencing growth. The problem that exists in Indonesia is that the rate of economic growth is unstable, which can experience growth or decline in its growth rate.

This research was conducted to analyze how the influence of government, private, export and import investment on economic growth in Indonesia. By taking the research object in 2010-2019. The analysis tool used is the panel data method in the form of a fixed effect model. Hypothesis testing using F-test, t-test, coefficient of determination and classical assumption test.

The results of the study state that the Government, Private, and Export Investment variables have a significant effect on Economic Growth while the Import variables have no significant effect on Economic Growth.

Keywords: Government Investment, Private Investment, Economic Growth,
Exports and Imports



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan untuk menciptakan perubahan dalam perekonomian, dimana terjadinya kenaikan output. Pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan akan tetapi dalam pertumbuhan, belum tentu mencakup unsur pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi yang terus menerus serta dapat mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari keberlangsungan pembangunan (Adisasmita, 2011:24). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting untuk melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah ukuran yang menggambarkan perkembangan perekonomian pada tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan sejauh mana kegiatan perkeekonomian yang dilakukan dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.

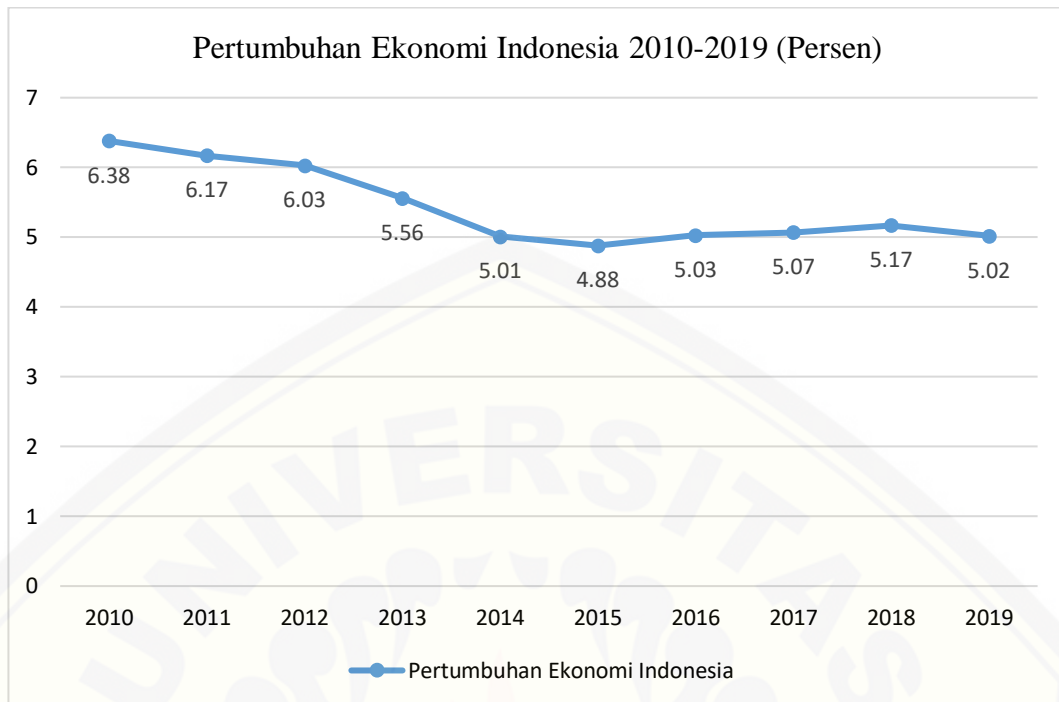
Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila balas jasa riil yang diberikan terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dapat dicerminkan oleh besarnya nilai PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. PDB ini juga akan menjelaskan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Semakin tinggi nilai PDBnya maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dan juga bermanfaat untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi data PDB adalah data atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu (Adisasmita, 2011:27).

Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2019 (juta rupiah)

Tahun	Produk Domestik Bruto di Indonesia
2010	6.864.133,10
2011	7.287.635,30
2012	7.727.083,40
2013	8.156.497,80
2014	8.564.866,60
2015	8.982.517,10
2016	9.434.613,40
2017	9.912.928,10
2018	10.425.397,30
2019	10.949.243,70

Sumber : BPS data diolah

Dapat kita lihat pada tabel di atas adalah tabel pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia di mana pada setiap tahunnya pada periode 2010-2019 nilai PDBnya selalu mengalami pertambahan, pada tahun 2010 nilai PDB sebesar 6.864.133,10, kemudian di tahun 2011 nilai PDBnya meningkat menjadi 7.287.635,30 di tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2012 PDB juga mengalami kenaikan menjadi 7.727.083,40. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 8.156.497,80. Kemudian tahun 2014 naik menjadi 8.564.866,60, pada tahun 2015 PDBnya naik menjadi 8.982.517,10, tahun 2016 PDBnya 9.434.613,40, kemudian 2017 9.912.928,10, tahun 2018 sebesar 10.425.397,30 dan terakhir PDB meningkat menjadi 10.949.243,70 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2010-2019 perekonomian selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Meskipun PDB Indonesia selalu mengalami peningkatan, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2010-2019 mengalami fluktuasi seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2019

Sumber : BPS data diolah

Terlihat pada gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi mulai tahun 2010-2019. Laju Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 sebesar 6,38%. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 6,17%. Kemudian pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 6,03%. Namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terlihat menurun menjadi 5,56%. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan menjadi 5,01%. Kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,88%, pada 2016 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 5,03%, akan tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 5,07%, pada tahun 2018 laju pertumbuhannya menurun menjadi 5,17%, dan terakhir pada tahun 2019 laju pertumbuhannya mengalami kenaikan menjadi 5,02%. Berdasarkan gambar 1.1 tampak bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat selama tiga tahun terakhir. Perlambatan ekonomi pada tahun 2015 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik, menurunnya harga

komoditas internasional, ketidakpastian pasar keuangan, depresiasi nilai tukar, serta menurunnya daya beli masyarakat (BPS Jatim, 2015).

Suatu daerah perlu memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya penurunan. PDB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun (BPS Jatim, 2015). Hal ini berarti laju pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat PDRB yang dimiliki. Suatu daerah juga memerlukan penambahan modal yang nantinya dapat memberikan keuntungan, salah satu cara dalam memperoleh tambahan dana yaitu dengan melakukan investasi. Menurut Hafriandi dan Gunawan (2018:399) investasi ini sangat penting karena suatu negara bisa mendapatkan modal tambahan yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan selanjutnya akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa investasi merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah.

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor penting untuk memberikan keuntungan terhadap suatu daerah. Investasi merupakan kumpulan sumber daya atau dana yang digunakan pada saat ini, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2010:2). Hal ini berarti dana yang digunakan sebagai investasi diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang diterima di masa mendatang. Investasi dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Menurut Samuelson (1992:136) penambahan stok bangunan gedung dan peralatan penting yang lainnya akan dapat meningkatkan output potensial negara dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang, sementara dalam jangka pendek, investasi sangat mempengaruhi permintaan agregat yang berakibat pada output dan kesempatan kerja. Apabila barang-barang modal umurnya lebih dari satu tahun, keputusan untuk melakukan investasi tergantung pada permintaan akan output yang dihasilkan pada investasi baru, tingkat suku bunga, pajak yang mempengaruhi biaya investasi, dan ekspektasi perorangan maupun kalangan pengusaha atas situasi ekonomi di masa depan

(Samuelson, 1992:137). Nizar, dkk (2013:1) menyatakan bahwa investasi yang terjadi di suatu negara terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta.

Investasi Pemerintah merupakan kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Waluyo dan Yulianti (2019:80) investasi pemerintah memiliki tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi yang dilakukan pemerintah ini dapat berasal dari belanja modal yang dilakukan guna menyediakan barang untuk masyarakat. Dengan begitu Investasi Pemerintah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang juga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Sungmin (2017:47) investasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan investasi yang dilakukan pemerintah dapat membangun perekonomian suatu daerah. Selain investasi yang dilakukan pemerintah terdapat investasi yang bertujuan untuk kesejahteraan dirinya sendiri atau untuk kemajuan usahanya yang disebut Investasi Swasta.

Investasi swasta yaitu investasi yang dilakukan untuk mendapatkan tambahan modal. Investasi sektor swasta merupakan investasi yang dilakukan bersumber pada pihak swasta nasional, masyarakat, perusahaan atau lembaga dengan harapan memperoleh profit dan pendapatan serta didorong adanya perbesaran pendapatan (Hafriandi dan Gunawan, 2018:401). Investasi dapat dilakukan oleh swasta berupa investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Wihda dan Poerwono, 2014:2). Penanaman modal yang dilakukan investasi swasta bertujuan untuk memperoleh tambahan modal. Menurut Fahmi (2017:18) kegiatan penanaman modal memiliki peranan penting untuk meningkatkan produksi suatu daerah. Dengan begitu yang dimaksud dengan Investasi Swasta adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang bersumber dari investasi dalam negeri maupun investasi asing yang dapat meningkatkan produksi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Seiring perkembangan di era globalisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi keterbukaan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah (Samuelson, 2004:285). Dimana pada era globalisasi ini kegiatan ekspor harus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat bersaing dengan negara lain (BPS, 2019). Keterbukaan ekonomi merupakan pemberian kemudahan pada hambatan-hambatan dalam perdagangan, sehingga mempermudah kegiatan perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Besarnya tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara/wilayah dapat dilihat dari besarnya nilai ekspor atau impor terhadap Produk Domestik Bruto suatu negara (Samuelson, 200:301). Oleh karena itu untuk melihat seberapa besar keterbukaan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari seberapa besarnya pengaruh ekspor terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kegiatan ekspor merupakan suatu aktivitas pendistribusian barang dari negara atau daerah asal ke negara lain. Menurut Samuelson (2004:325) ekspor merupakan suatu barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh orang-orang dari negara lain. Tujuan dari kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan keuntungan usaha melalui perluasan pasar dengan cara membuka pasar baru di luar negeri, melatih diri untuk melakukan persaingan dalam pasar internasional, dan memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (*idle capacity*) (Sutedi, 2014:15). Dengan begitu pelaksanaan ekspor ini dilakukan untuk memperluas dan meningkatkan keuntungan usahanya. Menurut Krueger (Sutedi, 2014:16) kegiatan ekspor yang dilakukan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah. Jadi kegiatan ekspor tidak hanya meningkatkan keuntungan usaha yang dilakukan tapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara/wilayahnya. Selain kegiatan pengiriman barang ke negara lain suatu negara juga akan melakukan pembelian barang dari negara asing yang dinamakan kegiatan impor yang berguna untuk memenuhi permintaan di negaranya.

Impor merupakan suatu kegiatan berupa pembelian barang dari negara lain yang dilakukan oleh suatu negara guna memenuhi kebutuhan dan permintaan suatu barang di negaranya. Tujuan dari kegiatan impor ini adalah untuk memperoleh

barang yang tidak mampu diproduksi dalam negeri dan juga untuk menciptakan efisiensi dalam memproduksi suatu barang di mana hal ini dapat memberikan pertambahan produksi pada barang yang menjadi keunggulan negara tersebut. Sehingga dengan adanya kegiatan impor ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan negaranya dan mendorong produksi sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan (Sukirno, 383:2016). Oleh karena itu ekspor dan impor ini penting untuk diteliti seberapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Indonesia mengalami fluktuasi mulai tahun 2010 sampai dengan 2019. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi ini dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap pendapatan di Provinsi Indonesia. Dengan begitu perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa hal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, dan Ekspor. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Investasi Pemerintah, Swasta, Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019
2. Pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019
3. Pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019
4. Pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, berikut ini manfaat yang diharapkan peneliti:

1. Untuk Akademisi dapat menjadi bahan pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk penelitian kedepannya terkait pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah, investasi swasta, ekspor, dan impor di Indonesia
2. Untuk Pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi untuk mengetahui faktor ekonomi mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga dapat menetapkan suatu kebijakan yang tepat mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2008) pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian pada tahun tertentu bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur dengan perkembangan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Dimana Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di mana PDRB ini juga juga dapat menjelaskan kemampuan suatu daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah perekonomian daerah. Hal ini dapat mengukur tingkat keberhasilan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dapat mendorong perekonomian daerah. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi pada perekonomian daerah.

Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah (Adisasmita, 2011:26):

1. PDRB adalah jumlah nilai nambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta, inovasi merupakan perbaikan

teknologi dalam arti luas (Adisasmita, 2011:24). Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat tercapainya pembangunan yang efisien, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi yang sangat memadai, sehingga diperlukan mekanisme pembangunan yang lebih sistematis (Adisasmita, 2011:25).

Dalam pelaksanaan perekonomian terbuka, terdapat empat sektor yang menjadi faktor bagi pertambahan pendapatan nasional (Y) di mana empat sektor tersebut merupakan konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) ditambah dengan sektor luar negeri berupa ekspor (X) dan impor (M). Model perekonomian empat sektor yaitu (Waluyo, 56:2019):

$$Y = C + I + G + (X-M) \text{ atau } Y = C + I + G + \text{net ekspor}$$

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Pada pertumbuhan ekonomi, investasi merupakan faktor penting bagi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dalam Teori Harrod-Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal (Sukirno, 2006:257). Dengan begitu untuk menambah produksi negara di masa yang akan datang perlu dilakukan investasi agar nanti modalnya tercukupi. Menurut Winardi (1989:211) investasi merupakan komponen yang paling cepat berubah dari pengeluaran, yang menunjukkan perubahan-perubahan lebih tajam dari tahun ke tahun dibandingkan dengan konsumsi perseorangan, hingga oleh karenanya investasi dianggap sebagai kekuatan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis Harrod-Domar, pertambahan kapasitas barang-barang modal yang efektif dapat dirumuskan sebagai (Sukirno, 2006:258):

$$\Delta Y_s = \sigma \cdot I \quad (1.1)$$

Di mana ΔY_s adalah pertambahan kapasitas yang efektif atas barang-barang modal yang baru, I adalah besar pembentukan modal yang dilakukan, dan σ adalah rasio produksi modal. Nilai σ disebut juga sebagai produktivitas modal.

Selanjutnya, sampai di mana pertambahan modal akan menciptakan pertambahan dalam pendapatan nasional dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\Delta Y_d = \frac{1}{\alpha} \cdot \Delta I \quad (1.2)$$

Syarat yang harus dicapai agar pertambahan kapasitas barang-barang modal yang terjadi akan selalu digunakan dengan sepenuhnya adalah: $\Delta Y_s = \Delta Y_d$, maka:

$$\sigma \cdot I = \frac{1}{\alpha} \Delta I \text{ atau } \frac{\Delta I}{I} = \sigma \cdot \alpha \quad (1.3)$$

Dari persamaan (1.3) dapat disimpulkan bahwa agar suatu perekonomian selalu mencapai tingkat kapasitas penuh dalam penggunaan barang-barang modal yang tersedia, haruslah pertambahan dalam tingkat penanaman modal selalu berkembang sebesar $\sigma \alpha$.

Tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu adalah sama dengan pertambahan pendapatan nasional pada masa itu dibagi dengan pendapatan nasional pada masa sebelumnya. Jika $\Delta Y_d / Y_d$ diuraikan, maka akan diperoleh:

$$\frac{\Delta Y_d}{Y_d} = \frac{\Delta I}{\alpha} / \frac{I}{\alpha} = \frac{\Delta I}{I} \quad (1.4)$$

sedangkan:

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma \cdot \alpha$$

maka:

$$\frac{\Delta Y_d}{Y_d} = \sigma \cdot \alpha \quad (1.5)$$

Dari persamaan (1.5) dapat dilihat bahwa agar barang-barang modal yang bertambah dari tahun ke tahun sebagai akibat dari penanaman modal pada tahun sebelumnya mencapai tingkat kapasitas penuh dari masa ke masa, haruslah perekonomian itu juga berkembang sesejalan dengan $\sigma \alpha$.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi David Ricardo

Ekspor dan Impor merupakan salah satu faktor penting dalam penambahan pendapatan nasional. David Ricardo mengemukakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan spesialisasi dan perdagangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori Ricardo negara-negara harus menjalankan sistem perdagangan bebas, di mana perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa adanya hambatan (Sukirno, 360:2016). Di mana keuntungan dari kegiatan perdagangan luar negeri yaitu, dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi di mana faktor-faktor produksi dapat digunakan secara efisien, dan dapat memperluas pasar industri-industri di dalam negeri.

Menurut Ricardo dalam Sukirno (2006:120) keuntungan dari perdagangan luar negeri yaitu apabila pada suatu negara telah tercapai tingkat kesempatan kerja penuh, kegiatan perdagangan luar negeri akan memungkinkan tercapainya tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada yang dapat dicapai bila tidak adanya kegiatan tersebut. Adanya keuntungan dari perdagangan yang telah dikemukakan oleh Ricardo dikarenakan adanya perbedaan harga relatif atau perbandingan harga dan barang yang diperdagangkan pada negara-negara yang melakukan perdagangan luar negeri atau ekspor tersebut (2006:121). Dengan begitu pelaksanaan kegiatan perdagangan luar negeri dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau wilayah yang melakukan perdagangan tersebut. Dimana keuntungan akan dicapai bila telah tercapainya tingkat kesempatan kerja penuh pada negara tersebut.

2.2 Teori Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah merupakan bagian dari kegiatan investasi yang perlu dilakukan, dimana investasi pemerintah ini merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah di negara/wilayah tersebut. Menurut

Rosyidi (2012:191) public investment atau investasi pemerintah adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dimana penanaman modal ini tidak dilakukan oleh pihak-pihak swasta. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyebutkan bahwa investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya.

Investasi pemerintah (Public Investment) biasanya dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya investasi jaringan-jaringan jalan raya, irigasi, rumah sakit, pelabuhan, dan lainnya yang biasa disebut social overhead capital (SOC) (Waluyo dan Yuliati, 2019:81). Dengan begitu investasi pemerintah merupakan penempatan modal berupa dana atau barang yang digunakan untuk jangka panjang yang memberikan keuntungan pada pertumbuhan suatu negara/wilayah.

2.3 Teori Investasi Swasta

Investasi swasta adalah investasi yang bersumber pada pihak swasta nasional, masyarakat, perusahaan atau lembaga dengan harapan memperoleh profit dan pendapatan serta didorong adanya perbesaran pendapatan. Investasi swasta pada umumnya digunakan untuk usaha-usaha yang bisa mengembangkan perekonomian. Investasi tersebut dilakukan secara langsung melalui pembelian obligasi, surat berharga dalam jangka panjang sekurang kurangnya satu tahun (Hafriandi dan Gunawan, 2018:401). Menurut Waluyo dan Yuliati (2019:81) investasi swasta (private investment) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh swasta dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan (profit) dan didorong oleh adanya penambahan pendapatan.

Investasi dapat dikatakan sebagai penanaman modal, karena dana yang digunakan dalam investasi bertujuan sebagai tambahan modal yang diharapkan pada masa yang akan datang. Menurut Fahmi (2017:12) konsep penanaman modal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk yang sering dikampanyekan oleh pemerintah (*government*) dalam rangka menarik minat investor baik domestik maupun internasional. Dengan begitu penanaman modal ini dapat berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2.3.1 Penanaman Modal Asing (PMA)

Salah satu penanaman modal yang penting bagi suatu pertumbuhan suatu daerah adalah investasi asing, atau biasa disebut Foreign Direct Investment (FDI). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari para investor di negara lain yang ditanamkan di suatu negara. Pada negara berkembang dan terbelakang kebijakan terhadap Foreign Direct Investment (FDI) sangatlah penting agar bisa setara dengan negara-negara maju (Fahmi, 2017:5). Kegiatan penanaman modal asing merupakan suatu upaya dalam memperoleh penambahan modal untuk pembangunan yang berasal dari investor luar negeri. Pengertian penanaman modal asing dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan barang-barang, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Dalam hal ini berarti bahwa penanaman modal asing merupakan keuntungan yang dapat diperoleh baik berupa stok barang modal ataupun penambahan uang yang diperoleh dari luar negeri. Menurut Putra (2018:156) investasi yang dilakukan antar negara atau suatu negara terhadap negara lain diharapkan bias mendapatkan hubungan kerjasama yang baik antar negara maupun antar investor. Dengan begitu penanaman modal asing yang dilakukan tidak hanya memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari investasi tetapi juga dapat menciptakan kerjasama yang baik.

2.3.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri dapat dijadikan sebagai salah satu pembiayaan dalam pembangunan suatu negara, dikarenakan dapat menghasilkan keuntungan berupa penambahan modal yang berasal dari kegiatan investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kemudian pada Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal yang dilakukan oleh penanam di dalam negeri yang digunakan untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia.

2.4 Teori Ekspor

Kegiatan ekspor merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan suatu negara atau wilayah. Ekspor dapat membuat perluasan pasar dan negara yang melakukan ekspor dapat memperoleh dana untuk melakukan impor pada barang lain termasuk barang modal yang dapat meningkatkan perekonomian lebih lanjut lagi (Sukirno, 2016:87). Dengan begitu kegiatan ekspor ini sangat penting untuk ditingkatkan untuk pertumbuhan suatu daerah. Menurut Sukirno (2016:87) dalam

perdagangan dunia belakangan ini menunjukkan bahwa ekspor yang tumbuh dengan pesat mampu menciptakan pertambahan pada perbelanjaan agregat yang dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang pesat pula. Dalam ekspor terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pendapat Meir (Sukirno, 2006:131) yang menjelaskan bahwa dalam perkembangan ekspor yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, bukan saja bergantung pada perkembangan ekspor itu sendiri, akan tetapi terdapat juga faktor-faktor lain yang memberikan dampak terhadap pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain:

- a. Tingkat perkembangan ekspor bertambah tinggi
- b. Akibat langsung dari kegiatan ekspor terhadap kesempatan kerja adalah tinggi
- c. Hanya sebagian kecil pendapatan dari ekspor diterima oleh golongan masyarakat yang memiliki kecondongan marjinal mengimpor yang tinggi
- d. Penanaman modal yang dilakukan dan dibiayai oleh tabungan sektor ekspor sangatlah produktif
- e. Perkembangan ekspor diciptakan oleh perkembangan teknologi
- f. Hubungan kait mengait di antara sektor ekspor dengan sektor-sektor lain sangat erat
- g. Pendapatan ekspor tetap berada di dalam negeri

2.4 Teori Impor

Impor merupakan kegiatan pembelian barang-barang dari negara lain yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri yang berguna untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang dan juga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi di negaranya (Sukirno, 360:2016). Dengan begitu suatu negara yang melakukan impor dapat mengurangi produksi barangnya yang kurang efisien dan membeli barang tersebut pada negara lain yang mampu memproduksinya

dengan lebih efisien dibandingkan bila diproduksi di negaranya sendiri, yang dimana keuntungan ini disebut sebagai keuntungan spesialisasi. Oleh karena itu dengan melakukan kegiatan impor dapat menimbulkan keuntungan spesialisasi dimana keuntungan tersebut berupa (Sukirno, 361:2016):

- a. Faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara dapat digunakan dengan lebih efisien.
- b. Suatu negara dapat menikmati lebih banyak barang yang didapatkan dari dalam negerinya sendiri.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel dan Metode	Kesimpulan
1	Azzumar (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja Regresi Linear Berganda (OLS)	Terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja. Dana Perimbangan dan Investasi Swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Tetapi Pendapatan Asli Daerah dan

				Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2	Nurhayati (2015)	Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Provinsi Tahun 2008-2013	Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Kemandirian Fiskal Daerah, Investasi Pemerintah Daerah, Pendapatan Per Kapita, dan Angkatan Kerja Daerah Analisis Regresi Linier Berganda	Kemandirian Fiskal dan Investasi Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pendapatan Per Kapita Daerah dan Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
3	Puspitasari (2016)	Pengaruh Investasi Publik, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Regional di Provinsi Indonesia	PDRB, Investasi Publik, Tenaga Kerja dan Investasi Swasta Regresi Linear Data Panel	Variabel Investasi Publik, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan regional di Indonesia. Koefisien Investasi Publik, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja pada masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda.

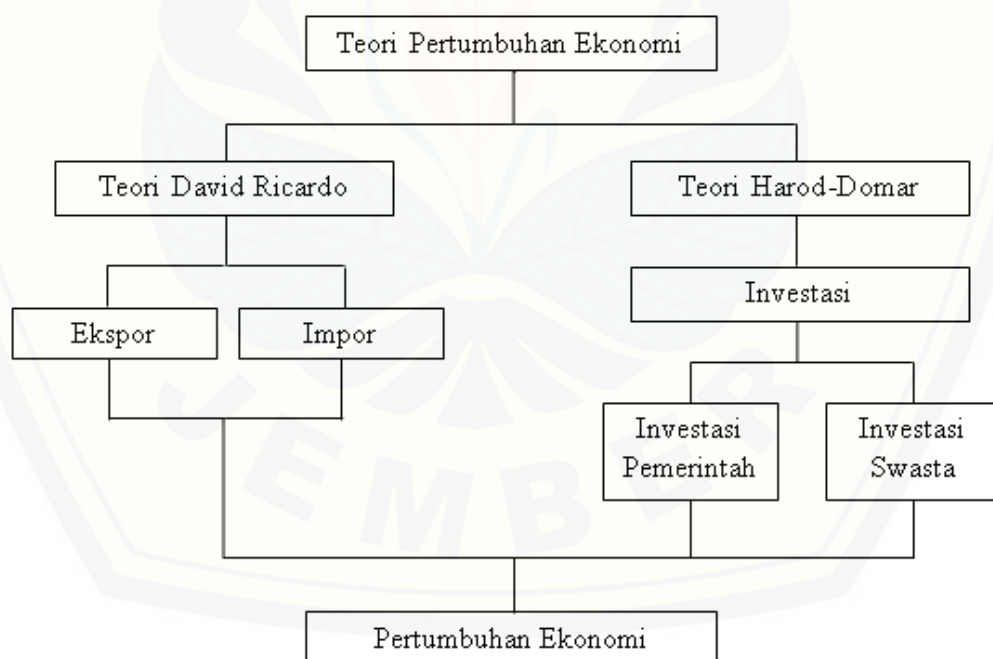
4	Ambarwati dan Payamta (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah dan Angkatan Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa	PAD, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja, Jumlah SKPD, Asset Daerah, dan PDRB Analisis Regresi Linier Berganda	PAD berpengaruh positif terhadap PDRB. Investasi Pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB
5	Putri (2017)	Pengaruh Faktor UMK, Belanja Pemerintah Daerah, Investasi Daerah, serta Inflasi Terhadap PDRB dan Posisi Perekonomian kabupaten/kota d Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015	UMK, Belanja Pemerintah Daerah, Inflasi, dan Investasi Swasta Analisis Regresi Data Panel Fixed Effect Model (FEM) dan Tipologi Klassen	Variabel UMK, Belanja Pemerintah Daerah, dan Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB signifikan. Faktor yang berpengaruh terhadap posisi perekonomian berdasarkan hasil regresi Multinomial Logistik adalah variabel Belanja Pemerintah Daerah terhadap posisi daerah berkembang cepat.
6	Putra (2016)	Pengaruh harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi di	Pertumbuhan Ekonomi, Harga Minyak Dunia, Ekspor netto, Nilai tukar rupiah, Pengeluaran Pemerintah ECM	Variabel pertumbuhan ekonomi, harga minyak dunia, ekspor netto, nilai tukar rupiah, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan

		Indonesia tahun 1985-2014		terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
7	Dedi dan lia (2020)	Peran Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (2007-2017)	Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor, dan Impor Analisi Regresi Linear Berganda	Variabel Impor berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
8	Ismadiyanti dan Fitri (2018)	Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor, Impor, dan Nilai Tukar ECM	Dalam jangka panjang ekspor dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan impor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Dalam jangka pendek ekspor dan impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan
ekonomi

Sumber : Data diolah 2020

2.7 Kerangka Pikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pikiran

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang harus diuji menggunakan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini memiliki hipotesis antara lain:

- a. Investasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- b. Investasi Swasta berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- c. Ekspor berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Indonesia
- d. Impor berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Indonesia

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa *explanatory research* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variable-variabel penelitian dengan melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 2006:4). Untuk menganalisisnya di sini digunakan perhitungan kuantitatif atau angka untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Dengan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas yaitu investasi pemerintah, Investasi swasta, Ekspor, dan Impor. Data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Bank Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh elemen yang terbentuk dalam suatu peristiwa atau orang yang menjadi pusat perhatian peneliti (Ferdinand, 2006). Sampel merupakan bagian dari keseluruhan yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2011). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan kriteria pemilihan sampel adalah teknik pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan suatu cara dimana cara yang akan digunakan adalah pengambilan sampel secara undian dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Sampel yang diambil berjumlah 20 Provinsi yang ada di Indonesia.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series di mana data time series merupakan sebuah kumpulan observasi terhadap nilai-nilai sebuah variabel dari beberapa periode waktu yang berbeda dan data cross section merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang dikumpulkan dalam satu periode yang sama (Nuryanto dan Pambuko, 2018:6) . Dalam regresi data panel terdapat tiga model di mana nantinya dipilih model terbaik dengan Hausman Test dan Chow Test (Nuryanto dan Pambuko, 2018:97). Tiga model tersebut yaitu :

a. Model Common Effect

Model common effect merupakan suatu model yang menggabungkan data time series dan corss section (Nuryanto dan Pambuko, 2018:84). Bila menggunakan model common effect maka dapat digunakan analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) di mana OLS ini adalah metode yang paling sering digunakan dalam penelitian.

b. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed effect model adalah sebuah metode regresi suatu data panel dengan memberi tambahan variabel dummy yang menunjukkan perbedaan konstanta antar objek (Nuryanto dan Pambuko, 2018:84). Pada model ini diasumsikan bahwa antar tiap individu memiliki efek yang berbeda, jadi dalam fixed effect model setiap individu tersebut adalah parameter yang tidak diketahui dan di lakukan estimasi dengan menggunakan variabel dummy.

c. Random Effect Model (REM)

Random effect model adalah metode regresi panel di mana efek dari setiap individu memiliki unsur acak berbeda dengan fixed effect model yang memiliki efek dari setiap individunya adalah tetap. Model random effect adalah model yang

mempertimbangkan kondisi acak (terdistribusi normal) antara rata-rata dengan karakteristik individu yang bersifat random.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari investasi pemerintah, investasi swasta, dan ekspor:

$$PE = f(IG, IP, E, M) \quad (3.1)$$

Dari model di atas (3.1) kemudian kita transformasikan ke bentuk regresi data panel, sehingga modelnya menjadi :

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 IG_{it} + \beta_2 IP_{it} + \beta_3 E_{it} + \beta_4 M_{it} + e_{it} \quad (3.2)$$

Dimana :

PE_{it} = Pertumbuhan ekonomi pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

IG_{it} = Investasi pemerintah pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

IP_{it} = Investasi swasta pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

X_{it} = Ekspor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

M_{it} = Impor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

e_{it} = Error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

3.4 Uji Spesifikasi Model

3.4.1 Chow Test

Chow test digunakan untuk memilih antara model common effect atau fixed effect model. Di mana hipotesisnya adalah (Nuryanto dan Pambuko, 2018:86):

Hipotesis :

H_0 : Common Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Keputusan diambil berdasarkan pernyataan berikut :

- a. Bila Uji-F nilai probabilitasnya $>$ alpha 5% maka H0 diterima
- b. Bila Uji-F nilai probabilitasnya $<$ alpha 5% maka H1 diterima

3.4.2 Hausman Test

Hausman test adalah suatu pengujian untuk memilih apakah model tersebut adalah berupa fixed effect atau random effect. Hausman Test dilakukan dengan cara sebagai berikut (Nuryanto dan Pambuko, 2018:87):

Hipotesis :

H0 = Random Effect Model

H1 = Fixed Efect Model

Keputusan diambil berdasarkan pernyataan berikut :

- a. Bila Uji Hausman nilai probabilitasnya $>$ alpha 5% maka H0 diterima
- b. Bila Uji Hausman nilai probabilitasnya $<$ alpha 5% maka H1 diterima

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji F

Uji F merupakan suatu pengujian untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependennya (Nuryanto dan Pambuko, 2018:45).

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₀: nilai prob. F-statistic = 0,005355

H_a: nilai prob. F-statistic \neq 0,005355

Kriteria Pengujian :

- a. Bila nilai prob. F-statistic sebesar 0,005355 maka H_0 diterima artinya secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Bila nilai prob. F-statistic tidak sebesar 0,005355 maka H_a diterima artinya secara simultan variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2 Uji t

Uji t merupakan suatu pengujian untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel-variabel independennya secara individu terhadap variabel dependennya (Nuryanto dan Pambuko, 2018:50). Langkah-langkah pengujiannya yaitu :

Hipotesis :

H_0 : nilai prob. $t > 0,05$

H_a : nilai prob. $t < 0,05$

Kriteria pengujian :

- a. Jika nilai prob. $t > 0,05$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai prob. $t < 0,05$, maka H_a diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3 Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan dari variabel independen yang mempunyai pengaruh linier terhadap variasi (naik turunnya) variabel dependen (Nuryanto dan Pambuko, 2018:51). Sifat-sifat R^2 yaitu nilainya selalu non negatif, sebab rasio dua jumlah kuadrat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu atau $0 \leq R^2 \leq 1$. Makin besar nilai R^2 maka makin tepat / cocok suatu garis regresi, sebaliknya makin

kecil R^2 maka makin tidak tepat garis regresi tersebut untuk mewakili data hasil observasi.

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Normalitas

Uji ini berguna untuk menguji apakah variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah terdistribusi normal atau tidak maka dapat digunakan Jarque-Bera test (Nuryanto dan Pambuko, 2018:28).

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier antar variabel independen di dalam regresi berganda (Nuryanto dan Pambuko, 2018:52). Ada tidaknya multikolinieritas dapat diketahui atau dilihat dari nilai koefisien korelasi sederhananya. Untuk mengatasi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan menggabungkan data cross section dan time series dan apabila dihadapkan dengan multikolinieritas yang serius maka cara untuk menyembuhkannya dengan mengeluarkan salah satu variabel yang berkorelasi dengan variabel lainnya.

3.6.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui dalam suatu model regresi terdapat kesamaan varians pada residualnya atau tidak, bila varians residualnya sama maka disebut homokedastisitas dan bila varians residualnya tidak sama maka disebut heterokedastisitas (Nuryanto dan Pambuko, 2018:56). Untuk mengatasi masalah terdapatnya heterokedastisitas maka dapat digunakan metode GLS, dengan menggunakan metode GLS maka akan mampu memperoleh regresi yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).

3.7 Definisi Operasional

Variabel yang dipakai yaitu variabel terikat berupa pertumbuhan ekonomi serta variabel bebas berupa investasi pemerintah, investasi swasta, ekspor, dan impor dengan batasan variabelnya yaitu :

a. Pertumbuhan Ekonomi (rupiah)

Pertumbuhan ekonomi adalah 20 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2019. Data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

b. Investasi Pemerintah (rupiah)

Investasi Pemerintah merupakan data Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di 20 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2019. Data belanja modal diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

c. Investasi Swasta (rupiah)

Investasi swasta adalah jumlah dari data investasi korporasi yaitu penanaman modal asing (PMA) ditambah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan data investasi rumah tangga yaitu kredit investasi ditambah dengan kredit modal kerja di 20 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2019. Data investasi korporasi dan investasi rumah tangga diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

d. Ekspor (rupiah)

Ekspor adalah seluruh produksi barang dan jasa dalam perekonomian dalam negeri yang di ekspor ke luar negeri di 20 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2019. Data ekspor diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

e. Impor (rupiah)

Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di 20 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2019. Data Impor diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data panel di Indonesia tahun 2010-2019 dengan menggunakan model *fixed effect model* sebagai berikut :

1. Variabel Investasi Pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga pertumbuhan dalam investasi pemerintah sangatlah penting diupayakan agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Variabel Investasi Swasta berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga pertumbuhan dalam investasi pemerintah sangatlah penting untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Variabel Ekspor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga pertumbuhan dalam investasi pemerintah sangatlah penting untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Variabel Impor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia . Sehingga peningkatan pada impor tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

5.2 Saran

Saran dari peneliti tentang permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah

1. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan ekspor bisa dengan penurunan tarif, memberikan kemudahan dalam proses perizinan kegiatan ekspor.

2. Meningkatkan besarnya investasi baik investasi pemerintah dan investasi swasta dimana untuk meningkatkan investasi swasta dapat dilakukan dengan memberikan keringanan-keringanan dalam birokrasi, melakukan deregulasi, dan bisa juga dengan insentif pajak agar dapat menarik investor-investor swasta.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. Rahardjo. 2005. *DASAR-DASAR EKONOMI WILAYAH*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ambarwati, Anik dan Payamta. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah dan Angkatan Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Vol.4 (1): 37-52.
- Azzumar, Mochamad Rizky. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Fahmi, Irham. 2017. *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Gujarati, Damodar N., dan Dawn C.Porter. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Hafriandi, Ahlul dan Eddy Gunawan. 2018. Pengaruh Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol.3 (3): 399-407.
- Han, Sunming. 2017. Contribution of Public Investment to Economic Growth and Productivity. *Journal of Economics Policy*. Vol.39 (4): 25-50.
- Karlita, Batari Saraswati. 2013. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap PDRB Sektor Industri di Kota Semarang Tahun 1993-2010. *Diponegoro Journal of Economics*. Vol.2 (4):1-8.
- Nurhayati, Mafizatun. 2015. Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Provinsi Tahun 2008-2013. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol.1 (3).
- Nizar, Chairul, dkk. 2013. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.1 (2): 1-8.
- Nuryanto, Zulfikar Bagus Pambuko. 2018. *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi*. Magelang: UNIMMA PRESS.

- Putri, Venia Kusuma. 2017. Pengaruh Faktor UMK, Belanja Pemerintah Daerah, Investasi Daerah, serta Inflasi Terhadap PDRB dan Posisi. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Puspitasari, Dwi. 2016. Pengaruh Investasi Publik, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Regional di Provinsi Indonesia. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Putra, Muhammad Dandy Kartarineka dan Sri Sulasmiyati. 2018. Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi pada Bank Indonesia Periode Kuartal IV 2008-2017). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol.58 (2): 155-163.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Edisi pertama. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Samuelson, Paul A. dan William D.Noedhaus. 2011. *Makroekonomi*. Edisi Keempat Belas. Jakarta: Erlangga.
- Sjafrizal, 2017. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Edisi Pertama (cetakan ketiga). Edisi Keempat belas. Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta: LP3ES
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 2016. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Protfolio dan Investasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Kanisius
- Tarigan, Drs.Robinson. 2018. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967. *Tentang Penanaman Modal Asing*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007. *Tentang Penanaman Modal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011. *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*.
- Waluyo,Dwi Eko dan Uci Yuliati. 2019. *Ekonomika Makro*. Edisi Revisi. Malang: UMM Press.

Wihda, Bambang Muqsyithu dan Dwisetia Poerwono. 2014. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta (Tahun 1996-2012). *Diponegoro Journal of Economics*. Vol.3 (1) 1-12.



LAMPIRAN

**LAMPIRAN A. Data Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Pemerintah, Ekspor,
dan Impor Tahun 2010-2019 di 20 Provinsi di Indonesia
(Milyar Rupiah)**

Tahun	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi	Investasi Pemerintah	Investasi Swasta	Ekspor	Impor
2010	Jakarta	1,075,183,481	5,243,147	735,982,973	167,842,170	623,708,109
2011	Jakarta	1,147,558,226	7,316,333	894,607,174	201,599,193	727,870,758
2012	Jakarta	1,222,527,925	8,784,366	1,088,086,757	224,117,319	795,573,959
2013	Jakarta	1,296,694,573	10,696,012	969,809,540	228,551,620	804,219,549
2014	Jakarta	1,373,389,129	10,411,118	1,099,315,531	230,043,955	801,138,803
2015	Jakarta	1,454,563,847	10,244,017	1,210,983,705	227,786,926	709,942,438
2016	Jakarta	1,539,916,881	8,965,470	1,301,440,146	227,542,943	695,046,540
2017	Jakarta	1,635,359,147	11,045,723	1,466,766,375	218,866,633	768,064,030
2018	Jakarta	1,736,291,045	14,118,608	1,646,305,052	229,175,901	851,748,978
2019	Jakarta	1,838,500,708	18,355,384	1,744,640,600	228,104,906	795,940,262
2010	Jawa Timur	990,648,840	6,322,263	151,269,151	142,703,110	167,713,780
2011	Jawa Timur	1,054,401,770	7,471,643	179,788,906	181,613,720	207,016,450
2012	Jawa Timur	1,124,464,640	9,693,857	244,917,741	194,727,320	222,000,100
2013	Jawa Timur	1,192,789,800	11,146,312	320,671,090	198,883,560	236,351,950
2014	Jawa Timur	1,262,684,500	13,952,370	354,544,773	194,635,850	269,540,310
2015	Jawa Timur	1,331,376,100	18,679,208	396,108,579	190,037,060	240,955,460
2016	Jawa Timur	1,405,563,510	20,541,364	416,779,342	209,023,110	241,000,490
2017	Jawa Timur	1,482,299,580	20,224,426	434,060,795	198,101,300	259,503,740
2018	Jawa Timur	1,563,769,100	18,572,375	456,338,869	204,166,530	279,498,190
2019	Jawa Timur	1,650,143,150	21,846,053	478,449,804	203,495,440	254,891,970
2010	Sumatera Utara	331,085,237	3,904,341	54,689,601	133,920,435	122,546,498
2011	Sumatera Utara	353,147,591	5,648,889	81,735,270	168,676,012	142,512,585
2012	Sumatera Utara	375,924,139	6,500,297	101,161,867	188,447,525	161,698,655
2013	Sumatera Utara	398,727,143	7,718,876	125,012,591	178,463,316	145,391,150
2014	Sumatera Utara	419,573,309	8,067,595	132,147,133	191,872,580	156,672,442
2015	Sumatera Utara	440,955,852	8,751,097	151,546,281	189,848,616	150,276,354
2016	Sumatera Utara	463,775,465	9,788,058	157,582,257	194,929,510	146,923,822
2017	Sumatera Utara	487,531,232	10,887,110	186,466,093	208,689,478	156,909,032
2018	Sumatera Utara	512,765,528	9,685,226	187,925,681	220,084,768	170,203,797
2019	Sumatera Utara	539,526,595	10,535,974	185,603,059	217,157,010	166,252,766
2010	Riau	388,578,227	4,836,302	31,653,700	151,221,372	15,109,085
2011	Riau	410,215,840	5,327,122	43,107,394	162,929,192	21,726,943
2012	Riau	425,625,999	6,996,455	56,615,170	225,188,741	24,683,130
2013	Riau	436,187,507	8,797,350	64,375,405	197,982,965	23,127,595
2014	Riau	447,986,782	7,418,557	75,189,681	208,785,665	20,048,166
2015	Riau	448,991,964	8,551,809	79,316,057	185,191,529	18,661,536
2016	Riau	458,769,340	6,285,251	79,506,869	161,767,684	20,899,563
2017	Riau	470,983,512	6,133,989	85,059,775	169,559,823	26,589,204
2018	Riau	482,158,385	4,601,158	95,638,306	168,968,072	26,627,395
2019	Riau	495,845,906	6,656,683	113,134,013	128,464,183	20,813,655

2010	Bali	93,749,350	922,166	19,704,260	30,918,015	13,334,405
2011	Bali	99,991,685	1,162,093	27,765,406	31,862,949	11,705,052
2012	Bali	106,951,465	1,986,077	39,566,864	33,174,014	6,025,578
2013	Bali	114,103,581	2,424,755	44,866,897	37,069,629	8,053,884
2014	Bali	121,787,575	2,604,704	56,177,253	43,139,801	10,276,551
2015	Bali	129,126,562	2,835,910	64,815,578	45,736,990	9,263,655
2016	Bali	137,296,445	4,085,349	68,565,867	52,314,230	11,369,062
2017	Bali	144,933,312	3,974,131	76,610,864	56,024,959	13,317,176
2018	Bali	154,109,802	3,146,079	84,012,801	59,447,660	16,568,491
2019	Bali	162,783,940	4,880,946	86,249,821	59,187,146	14,335,463
2010	Nusa Tenggara Barat	70,122,726	1,104,465	7,265,401	18,255,781	3,713,247
2011	Nusa Tenggara Barat	67,379,141	1,835,902	9,331,166	10,808,467	3,738,909
2012	Nusa Tenggara Barat	66,340,812	1,799,357	14,094,795	6,873,024	3,072,493
2013	Nusa Tenggara Barat	69,766,714	2,247,487	18,105,323	5,076,658	2,490,568
2014	Nusa Tenggara Barat	73,372,964	2,392,338	20,043,713	4,048,769	2,231,650
2015	Nusa Tenggara Barat	89,337,986	3,158,411	23,371,460	15,930,942	2,834,460
2016	Nusa Tenggara Barat	94,524,290	3,650,425	23,133,360	18,514,145	2,537,080
2017	Nusa Tenggara Barat	94,608,209	4,628,111	23,046,902	13,239,096	2,573,731
2018	Nusa Tenggara Barat	90,391,458	4,021,320	36,020,171	6,518,750	3,223,141
2019	Nusa Tenggara Barat	94,014,743	4,303,174	43,414,222	3,884,714	2,594,122
2010	Kalimantan Barat	86,065,855	2,527,101	14,294,824	11,531,071	13,450,178
2011	Kalimantan Barat	90,797,591	2,734,259	22,685,814	19,992,976	24,014,771
2012	Kalimantan Barat	96,161,928	2,965,856	29,483,409	16,077,198	19,166,051
2013	Kalimantan Barat	101,980,339	4,025,240	37,832,922	18,475,303	20,621,767
2014	Kalimantan Barat	107,114,963	4,378,537	48,875,152	9,882,068	12,293,710
2015	Kalimantan Barat	112,346,755	4,555,773	62,956,503	9,501,430	12,546,782
2016	Kalimantan Barat	118,183,273	5,483,468	62,985,114	10,797,309	9,917,502
2017	Kalimantan Barat	124,271,323	5,466,270	68,147,209	14,336,101	9,243,308
2018	Kalimantan Barat	130,589,023	4,803,787	65,520,865	14,861,329	11,890,719
2019	Kalimantan Barat	137,121,182	5,202,116	70,160,271	16,364,864	12,146,665
2010	Kalimantan Timur	383,293,002	6,836,832	54,292,159	268,354,014	64,016,994
2011	Kalimantan Timur	407,435,383	6,965,031	62,324,562	313,320,897	59,880,739

2012	Kalimantan Timur	428,877,711	10,263,037	84,845,383	318,622,948	69,320,924
2013	Kalimantan Timur	438,532,907	15,065,818	108,848,065	324,367,432	80,286,680
2014	Kalimantan Timur	446,029,049	12,363,938	108,512,820	299,360,399	80,791,306
2015	Kalimantan Timur	440,676,356	13,080,301	113,466,713	251,249,527	83,607,146
2016	Kalimantan Timur	439,003,832	7,054,839	98,169,153	226,417,674	72,988,235
2017	Kalimantan Timur	452,741,908	5,342,672	99,264,300	232,187,148	74,817,836
2018	Kalimantan Timur	464,823,485	7,535,201	119,771,433	223,564,146	81,842,554
2019	Kalimantan Timur	486,977,181	9,032,749	126,933,355	243,719,077	61,003,694
2010	Sulawesi Tengah	51,752,071	1,546,895	6,947,426	3,513,061	292,812
2011	Sulawesi Tengah	56,833,829	1,660,719	13,548,355	4,791,231	302,946
2012	Sulawesi Tengah	62,249,529	1,911,964	17,088,113	5,236,059	329,429
2013	Sulawesi Tengah	68,219,319	2,295,487	19,714,679	5,475,998	360,141
2014	Sulawesi Tengah	71,677,531	2,487,855	29,044,042	3,915,543	411,802
2015	Sulawesi Tengah	82,787,202	3,300,966	30,796,926	8,131,153	1,571,705
2016	Sulawesi Tengah	91,014,565	4,063,140	36,860,188	21,002,828	12,272,821
2017	Sulawesi Tengah	97,474,859	3,798,582	37,402,125	27,936,446	13,689,127
2018	Sulawesi Tengah	103,593,339	3,357,721	36,090,426	62,250,316	31,845,911
2019	Sulawesi Tengah	111,003,074	4,458,866	49,310,181	74,834,050	33,834,139
2010	Sulawesi Selatan	171,740,740	2,891,296	31,633,963	22,971,620	10,394,140
2011	Sulawesi Selatan	185,708,470	3,737,269	38,227,882	17,333,110	12,003,480
2012	Sulawesi Selatan	202,184,590	3,523,381	48,070,723	15,533,440	11,106,030
2013	Sulawesi Selatan	217,589,130	4,342,288	52,061,179	16,458,160	12,418,050
2014	Sulawesi Selatan	233,988,050	5,516,180	60,241,712	18,071,270	7,973,670
2015	Sulawesi Selatan	250,802,990	7,547,112	73,911,549	16,703,580	10,240,270
2016	Sulawesi Selatan	269,401,310	9,477,571	72,466,652	13,095,030	10,023,620
2017	Sulawesi Selatan	288,814,170	8,644,309	80,801,191	12,948,170	12,400,750
2018	Sulawesi Selatan	309,202,400	7,900,655	87,688,973	15,893,520	8,189,250

2019	Sulawesi Selatan	330,605,130	8,545,639	87,037,245	17,545,190	8,055,900
2010	Papua Barat	41,361,672	3,130,210	1,884,924	15,472,372	862,301
2011	Papua Barat	42,867,187	2,807,244	2,960,432	22,580,422	778,213
2012	Papua Barat	44,423,335	3,348,914	4,204,466	28,231,810	447,699
2013	Papua Barat	47,705,865	3,846,509	5,607,693	26,238,640	623,009
2014	Papua Barat	50,259,910	4,632,948	7,280,801	30,710,170	590,160
2015	Papua Barat	52,346,490	6,642,715	10,548,326	35,728,909	499,430
2016	Papua Barat	54,711,280	5,954,414	16,505,921	30,274,090	1,118,480
2017	Papua Barat	56,906,820	4,676,731	11,559,879	28,211,980	1,009,570
2018	Papua Barat	60,453,560	5,297,010	15,758,219	38,706,420	896,560
2019	Papua Barat	62,070,800	6,329,380	13,370,441	33,940,410	1,137,220
2010	Papua	110,808,177	6,870,227	7,559,736	46,999,046	9,740,485
2011	Papua	106,066,723	7,635,589	19,303,250	33,910,145	10,153,360
2012	Papua	107,890,943	7,584,945	19,568,479	24,281,055	9,271,361
2013	Papua	117,118,819	8,250,214	35,076,240	32,143,119	5,451,847
2014	Papua	121,391,234	10,098,195	25,915,074	17,091,171	11,190,904
2015	Papua	130,311,605	13,639,230	25,421,155	23,736,758	8,896,566
2016	Papua	142,224,931	12,536,710	28,535,976	25,377,053	9,309,077
2017	Papua	148,818,290	9,608,320	40,551,551	24,016,292	5,955,440
2018	Papua	159,790,310	10,129,635	31,377,457	33,525,497	6,457,711
2019	Papua	134,677,638	12,185,975	29,742,363	10,360,383	4,493,510
2010	Jawa Barat	906,685,760	6,049,844	158,411,020	226,580,609	136,658,473
2011	Jawa Barat	965,622,061	6,781,999	207,380,138	239,424,314	152,080,767
2012	Jawa Barat	1,028,409,739	10,681,417	259,327,594	254,271,202	142,905,277
2013	Jawa Barat	1,093,543,545	12,982,497	341,908,923	245,716,075	139,505,919
2014	Jawa Barat	1,149,216,057	13,858,602	404,961,515	269,833,686	149,533,865
2015	Jawa Barat	1,207,232,342	17,859,907	431,519,897	272,010,777	145,837,893
2016	Jawa Barat	1,275,619,241	19,959,613	433,423,095	261,381,265	153,437,741
2017	Jawa Barat	1,343,662,142	18,525,802	455,176,752	279,390,010	142,827,181
2018	Jawa Barat	1,419,689,116	17,810,839	510,861,337	298,137,107	146,000,688
2019	Jawa Barat	1,491,705,807	17,923,105	548,835,676	289,524,379	138,924,966
2010	Sumatera Selatan	194,012,973	3,790,543	24,253,064	32,905,899	4,574,839
2011	Sumatera Selatan	206,360,700	5,213,718	38,044,652	42,609,543	6,073,464
2012	Sumatera Selatan	220,459,198	6,108,447	52,095,671	41,201,265	5,613,006
2013	Sumatera Selatan	232,353,629	7,913,245	60,631,664	41,153,841	6,626,219

2014	Sumatera Selatan	243,228,567	8,344,129	80,138,637	47,310,571	7,178,307
2015	Sumatera Selatan	254,044,880	6,940,538	87,023,052	38,244,820	19,895,740
2016	Sumatera Selatan	266,857,400	6,727,451	120,620,403	33,010,900	13,334,860
2017	Sumatera Selatan	281,571,010	7,640,391	100,853,226	56,994,360	7,538,070
2018	Sumatera Selatan	298,569,690	7,868,765	113,583,414	60,162,580	11,735,800
2019	Sumatera Selatan	315,623,000	9,309,971	116,659,900	57,827,590	10,038,850
2010	Jawa Tengah	623,224,621	3,667,042	218,304,801	43,652,537	97,675,338
2011	Jawa Tengah	656,268,130	5,120,508	270,179,550	49,680,050	105,571,105
2012	Jawa Tengah	691,343,116	7,245,837	355,877,651	53,707,483	112,615,212
2013	Jawa Tengah	726,655,118	8,347,447	449,566,805	61,923,620	127,813,413
2014	Jawa Tengah	764,959,151	10,714,623	520,898,160	68,523,198	118,498,481
2015	Jawa Tengah	806,765,092	13,019,978	602,973,154	68,716,855	99,894,365
2016	Jawa Tengah	849,099,354	17,234,138	632,498,971	66,644,884	95,528,921
2017	Jawa Tengah	893,750,296	16,075,267	678,981,824	75,670,847	104,677,125
2018	Jawa Tengah	941,164,119	15,532,094	698,540,926	84,578,080	138,816,755
2019	Jawa Tengah	992,105,788	15,421,453	685,335,741	88,741,240	125,870,653
2010	Sumatera Barat	105,017,739	2,066,027	12,698,322	17,901,115	7,854,320
2011	Sumatera Barat	111,679,492	2,208,491	17,508,262	21,312,944	8,814,622
2012	Sumatera Barat	118,724,424	2,774,214	20,591,962	17,555,983	9,907,457
2013	Sumatera Barat	125,940,634	3,179,200	22,949,761	19,281,019	8,476,835
2014	Sumatera Barat	133,340,836	3,680,184	26,259,055	19,921,710	8,872,590
2015	Sumatera Barat	140,719,414	4,213,261	30,288,459	20,529,971	8,762,256
2016	Sumatera Barat	148,134,243	5,187,401	33,841,981	18,179,768	6,069,713
2017	Sumatera Barat	155,984,364	5,126,246	34,834,872	21,591,751	6,850,602
2018	Sumatera Barat	164,033,655	4,963,457	34,964,797	19,886,550	6,885,642
2019	Sumatera Barat	172,320,500	6,262,112	34,540,321	18,191,569	5,889,183
2010	Lampung	150,560,841	1,820,724	19,467,257	25,143,334	19,083,467

2011	Lampung	160,437,501	2,669,800	27,281,259	29,847,352	23,185,273
2012	Lampung	170,769,206	3,477,501	29,983,432	36,781,643	24,242,169
2013	Lampung	180,620,007	3,848,461	35,533,729	40,447,749	26,114,737
2014	Lampung	189,789,999	3,987,565	40,304,934	36,609,812	35,598,094
2015	Lampung	199,536,917	4,466,006	44,615,738	43,020,828	25,364,938
2016	Lampung	209,813,980	5,655,416	50,185,493	35,732,199	25,385,716
2017	Lampung	220,626,096	6,474,510	52,380,765	41,375,596	35,726,950
2018	Lampung	232,207,677	6,167,262	55,037,203	40,207,991	35,757,469
2019	Lampung	244,436,794	5,742,429	57,589,090	32,900,282	34,107,169
2010	Aceh	101,550,000	5,223,145	7,704,374	12,680,000	1,480,000
2011	Aceh	104,870,000	3,780,569	9,889,063	10,110,000	2,170,000
2012	Aceh	108,910,000	2,800,285	12,704,501	8,350,000	1,500,000
2013	Aceh	111,760,000	4,371,294	17,576,693	6,540,000	1,240,000
2014	Aceh	113,490,000	7,372,452	18,406,239	4,940,000	1,570,000
2015	Aceh	112,670,000	8,553,029	17,619,470	1,750,000	2,470,000
2016	Aceh	116,370,000	9,870,070	19,216,968	1,100,000	1,870,000
2017	Aceh	121,240,000	8,920,152	18,431,519	2,180,000	1,900,000
2018	Aceh	126,820,000	6,320,934	22,069,077	3,300,000	1,760,000
2019	Aceh	132,090,000	8,922,992	25,138,641	4,010,000	2,700,000
2010	Jambi	90,618,410	2,108,863	9,590,156	15,444,691	2,827,108
2011	Jambi	97,740,874	2,409,240	16,514,748	36,560,563	1,969,264
2012	Jambi	104,615,082	3,054,503	18,327,554	34,396,398	1,389,176
2013	Jambi	112,008,701	4,130,163	22,282,969	33,898,850	2,886,974
2014	Jambi	120,696,234	4,013,989	22,372,575	34,119,546	2,508,301
2015	Jambi	125,037,400	3,532,592	27,904,361	32,974,660	1,542,350
2016	Jambi	130,501,130	3,731,396	28,298,788	28,727,740	1,574,620
2017	Jambi	136,501,710	3,913,989	28,619,855	34,895,520	926,320

2018	Jambi	142,968,300	3,675,246	32,674,188	39,277,700	1,069,060
2019	Jambi	149,264,620	4,341,747	35,065,826	38,987,050	910,470
2010	Kalimantan Selatan	85,304,997	2,803,174	20,028,901	74,947,785	60,292,732
2011	Kalimantan Selatan	91,252,128	2,588,666	22,260,283	91,457,942	73,712,172
2012	Kalimantan Selatan	96,697,838	3,325,679	30,038,070	91,807,106	74,301,045
2013	Kalimantan Selatan	101,850,536	4,786,867	38,746,519	91,706,846	72,126,909
2014	Kalimantan Selatan	106,779,397	5,344,591	35,598,720	91,123,191	70,422,319
2015	Kalimantan Selatan	110,863,116	6,080,305	47,947,230	84,548,668	63,965,122
2016	Kalimantan Selatan	115,743,572	6,408,490	40,371,385	84,859,056	62,063,177
2017	Kalimantan Selatan	121,858,523	5,033,993	44,346,157	92,462,023	68,384,024
2018	Kalimantan Selatan	128,092,672	4,531,484	53,982,834	96,694,710	72,459,246
2019	Kalimantan Selatan	133,317,865	5,355,348	56,486,061	97,639,965	72,431,855

LAMPIRAN B

1. Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(PE)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/24/20 Time: 09:54
 Sample: 2010 2019
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.618348	0.593363	6.098036	0.0000
LOG(IG)	0.249734	0.049992	4.995461	0.0000
LOG(IP)	0.481212	0.036409	13.21673	0.0000
LOG(X)	0.145081	0.029151	4.976903	0.0000
LOG(M)	0.033741	0.026706	1.263430	0.2079
R-squared	0.904180	Mean dependent var		19.25517
Adjusted R-squared	0.902215	S.D. dependent var		0.997468
S.E. of regression	0.311914	Akaike info criterion		0.532506
Sum squared resid	18.97166	Schwarz criterion		0.614964
Log likelihood	-48.25061	Hannan-Quinn criter.		0.565876
F-statistic	460.0181	Durbin-Watson stat		0.139524

Prob(F-statistic) 0.000000

2. Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(PE)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/24/20 Time: 09:57
 Sample: 2010 2019
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.00828	0.273396	43.92272	0.0000
LOG(IG)	0.141447	0.022404	6.313589	0.0000
LOG(IP)	0.205254	0.019032	10.78447	0.0000
LOG(X)	0.074945	0.015581	4.810067	0.0000
LOG(M)	0.002620	0.011873	0.220703	0.8256

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996252	Mean dependent var	19.25517
Adjusted R-squared	0.995762	S.D. dependent var	0.997468
S.E. of regression	0.064934	Akaike info criterion	-2.518738
Sum squared resid	0.742080	Schwarz criterion	-2.122940
Log likelihood	275.8738	Hannan-Quinn criter.	-2.358565
F-statistic	2034.013	Durbin-Watson stat	0.670881
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(PE)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/24/20 Time: 09:59
 Sample: 2010 2019
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 200
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.41981	0.270560	42.20800	0.0000

LOG(IG)	0.110031	0.021756	5.057408	0.0000
LOG(IP)	0.244138	0.018271	13.36234	0.0000
LOG(X)	0.081284	0.015277	5.320635	0.0000
LOG(M)	0.018681	0.011581	1.613108	0.1083

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.247263	0.9355
Idiosyncratic random		0.064934	0.0645

Weighted Statistics			
R-squared	0.800638	Mean dependent var	1.593547
Adjusted R-squared	0.796549	S.D. dependent var	0.174290
S.E. of regression	0.078615	Sum squared resid	1.205147
F-statistic	195.7805	Durbin-Watson stat	0.452293
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.686674	Mean dependent var	19.25517
Sum squared resid	62.03641	Durbin-Watson stat	0.008786

LAMPIRAN C

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: LOGFE
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	227.554223	(19,176)	0.0000
Cross-section Chi-square	648.248856	19	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOG(PE)
Method: Panel Least Squares
Date: 11/24/20 Time: 09:57
Sample: 2010 2019

Periods included: 10
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.618348	0.593363	6.098036	0.0000
LOG(IG)	0.249734	0.049992	4.995461	0.0000
LOG(IP)	0.481212	0.036409	13.21673	0.0000
LOG(X)	0.145081	0.029151	4.976903	0.0000
LOG(M)	0.033741	0.026706	1.263430	0.2079
R-squared	0.904180	Mean dependent var		19.25517
Adjusted R-squared	0.902215	S.D. dependent var		0.997468
S.E. of regression	0.311914	Akaike info criterion		0.532506
Sum squared resid	18.97166	Schwarz criterion		0.614964
Log likelihood	-48.25061	Hannan-Quinn criter.		0.565876
F-statistic	460.0181	Durbin-Watson stat		0.139524
Prob(F-statistic)	0.000000			

2.Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: RE
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	94.826035	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(IG)	0.141447	0.110031	0.000029	0.0000
LOG(IP)	0.205254	0.244138	0.000028	0.0000
LOG(X)	0.074945	0.081284	0.000009	0.0385
LOG(M)	0.002620	0.018681	0.000007	0.0000

Cross-section random effects test equation:
 Dependent Variable: LOG(PE)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/24/20 Time: 09:59
 Sample: 2010 2019
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.00828	0.273396	43.92272	0.0000

LOG(IG)	0.141447	0.022404	6.313589	0.0000
LOG(IP)	0.205254	0.019032	10.78447	0.0000
LOG(X)	0.074945	0.015581	4.810067	0.0000
LOG(M)	0.002620	0.011873	0.220703	0.8256

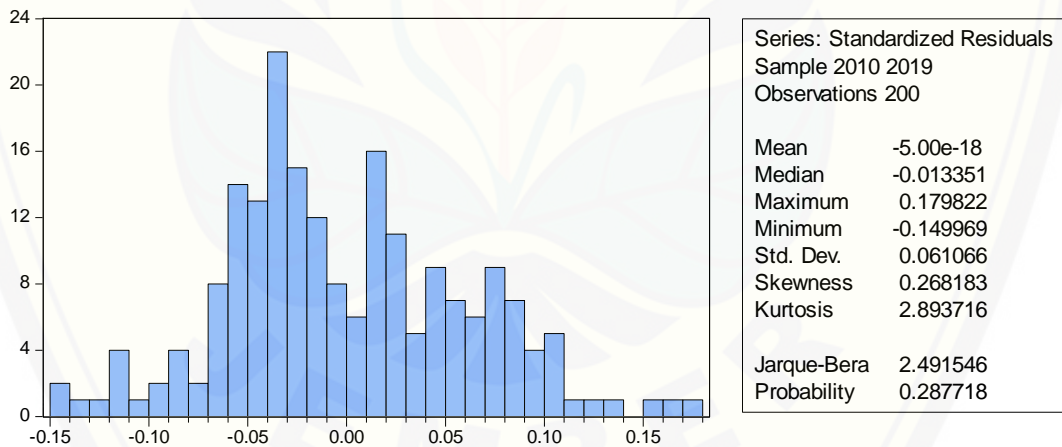
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996252	Mean dependent var	19.25517
Adjusted R-squared	0.995762	S.D. dependent var	0.997468
S.E. of regression	0.064934	Akaike info criterion	-2.518738
Sum squared resid	0.742080	Schwarz criterion	-2.122940
Log likelihood	275.8738	Hannan-Quinn criter.	-2.358565
F-statistic	2034.013	Durbin-Watson stat	0.670881
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN D

1. Uji Normalitas



2. Uji Multikolinearitas

	LOG(IG)	LOG(IP)	LOG(X)	LOG(M)
LOG(IG)	1.000000	0.700170	0.533225	0.575299
LOG(IP)	0.700170	1.000000	0.676906	0.849354
LOG(X)	0.533225	0.676906	1.000000	0.794704
LOG(M)	0.575299	0.849354	0.794704	1.000000

3. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/24/20 Time: 10:29
 Sample: 2010 2019
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20659818	60320191	0.342503	0.7324
LOG(IG)	-818683.0	4942988.	-0.165625	0.8686
LOG(IP)	-1575532.	4199177.	-0.375200	0.7080
LOG(X)	1161880.	3437678.	0.337984	0.7358
LOG(M)	827326.5	2619624.	0.315819	0.7525

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.304428	Mean dependent var	13989489
Adjusted R-squared	0.213529	S.D. dependent var	16154703
S.E. of regression	14326506	Akaike info criterion	35.90529
Sum squared resid	3.61E+16	Schwarz criterion	36.30109
Log likelihood	-3566.529	Hannan-Quinn criter.	36.06546
F-statistic	3.349092	Durbin-Watson stat	1.147652
Prob(F-statistic)	0.000003		

1. Uji F

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/10/20 Time: 19:21
 Sample: 2010 2019
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 200

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996252	Mean dependent var	19.25517
Adjusted R-squared	0.995762	S.D. dependent var	0.997468
S.E. of regression	0.064934	Akaike info criterion	-2.518738
Sum squared resid	0.742080	Schwarz criterion	-2.122940
Log likelihood	275.8738	Hannan-Quinn criter.	-2.358565
F-statistic	2034.013	Durbin-Watson stat	0.670881
Prob(F-statistic)	0.000000		

2. Uji t

Dependent Variable: LOG(PE)
Method: Panel Least Squares
Date: 11/24/20 Time: 09:57
Sample: 2010 2019
Periods included: 10
Cross-sections included: 20
Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.00828	0.273396	43.92272	0.0000
LOG(IG)	0.141447	0.022404	6.313589	0.0000
LOG(IP)	0.205254	0.019032	10.78447	0.0000
LOG(X)	0.074945	0.015581	4.810067	0.0000
LOG(M)	0.002620	0.011873	0.220703	0.8256